



EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK PROGRAM BANTUAN GAS ALAM DI KELURAHAN 35 ILIR KOTA PALEMBANG

Bilal Das^{1*}, Taufik Akhyar², Dumyati³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

Korespondensi penulis: Bilaldas2002@gmail.com

Abstract (English)

This study discusses the "Evaluation of the Political Policy of the Natural Gas Assistance Program in the 35 Ilir Village of Palembang City". The aim is to determine the Evaluation of the Political Policy of the Natural Gas Assistance Program and to determine the factors causing inaccurate targeting in the distribution of natural gas subsidies felt by the community. The research method used is qualitative. With primary data, namely employees and the community in the 35 Ilir Village. Data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study indicate that first, evaluation of the natural gas assistance program is very important to ensure the program runs on target, efficiently, and provides real benefits to the community in need. The evaluation helps identify obstacles in implementation such as distribution problems, inaccurate recipients, and lack of socialization that can hinder the effectiveness of the program. Second, there are five factors causing inaccurate targeting in the distribution of natural gas subsidies that have been felt by the community, starting from technical problems in the gas distribution network, inaccurate data collection of subsidy recipients, lack of socialization and information, less than optimal distribution supervision and control and the number of subsidized gas users is not balanced by an increase in gas supply, therefore the need to improve the distribution mechanism, improve data, strengthen supervision, and increase socialization so that the natural gas subsidy program reaches the right target and benefits for the community optimally.

Article History

Submitted: 1 November 2025

Accepted: 4 November 2025

Published: 5 November 2025

Key Words

Evaluation, political policy, natural gas assistance program

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini membahas tentang "Evaluasi Kebijakan Politik Program Bantuan Gas Alam di Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang". Bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Politik Program Bantuan Gas Alam dan untuk mengetahui faktor penyebab ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi gas alam yang dirasakan oleh Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Dengan data primer yaitu pegawai dan masyarakat di Kelurahan 35 Ilir. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. evaluasi program bantuan gas alam sangat penting dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi membantu mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan seperti permasalahan distribusi, ketidaktepatan penerima bantuan, dan kurangnya sosialisasi yang dapat menghambat efektivitas program. Kedua, terdapat lima faktor penyebab ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi gas alam yang sempat dirasakan masyarakat mulai dari gangguan teknis pada jaringan distribusi gas, ketidaktepatan pendataan penerima subsidi, kurangnya sosialisasi dan informasi, Pengawasan dan kontrol distribusi yang belum maksimal serta jumlah

Sejarah Artikel

Submitted: 1 November 2025

Accepted: 4 November 2025

Published: 5 November 2025

Kata Kunci

Evaluasi, kebijakan politik, program bantuan gas Alam





pengguna gas subsidi tanpa diimbangi dengan peningkatan pasokan gas, maka dari itu perlunya perbaikan mekanisme distribusi, perbaikan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan sosialisasi agar program subsidi gas alam mencapai sasaran yang tepat dan manfaat bagi masyarakat optimal

1. INTRODUCTION

Konflik agraria merupakan fenomena struktural yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Konflik ini umumnya melibatkan perebutan akses dan kontrol atas tanah antara masyarakat lokal, negara, dan sektor swasta. Dinamika konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan fisik, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih dalam. Dalam konteks modern, meningkatnya kebutuhan lahan akibat urbanisasi, ekspansi sektor perkebunan, dan pembangunan infrastruktur sering kali menimbulkan gesekan dengan masyarakat yang telah lama bermukim dan menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.

Salah satu kasus yang merepresentasikan persoalan agraria tersebut terjadi di Desa Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Konflik ini melibatkan masyarakat desa dengan PT Swarna Cinde Raya, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengklaim lahan seluas 200 hektar, yang menurut warga merupakan tanah warisan atau hasil pembelian pribadi. Aktivitas penggusuran oleh pihak perusahaan tanpa musyawarah dengan warga menimbulkan ketegangan dan menyingkap persoalan serius mengenai politik hak atas tanah, yakni bagaimana legitimasi kepemilikan dan penguasaan lahan ditentukan oleh relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan korporasi (Astirini Swarastuti et al., 2024).

Pendekatan kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi, baik melalui pemberian izin maupun sikap pasif terhadap pengaduan masyarakat, memperburuk eskalasi konflik. Meskipun masyarakat telah melakukan berbagai upaya hukum dan administratif termasuk menyampaikan keluhan kepada instansi daerah, kepolisian, hingga Presiden Republik Indonesia respons yang diterima dinilai lamban dan tidak substantif. Bahkan, upaya warga dalam memperoleh dokumen penting dari pihak kepolisian mengalami hambatan, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam konflik agraria (Achmad Leofaragusta K K et al., 2025; Bambang Purwanto & Hidayad, 2022).

Kondisi ini menciptakan frustrasi sosial dan potensi konflik horizontal yang lebih luas. Aksi-aksi protes yang dilakukan warga merupakan ekspresi dari rasa ketidakadilan yang mendalam, sekaligus seruan terhadap negara agar menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam melindungi hak rakyat atas tanah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji konflik ini tidak hanya sebagai sengketa agraria semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola agraria nasional, politik pertanahan, dan respons institusional pemerintah (Ardianto et al., 2025; Bonar Siagian & M Bambang Purwanto, 2023).

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengeksplorasi dinamika konflik antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya dengan menggunakan pendekatan politik

hak atas tanah, serta menganalisis sejauh mana negara khususnya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merespons konflik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus keilmuan mengenai konflik agraria dan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam Gas alam adalah sumber energi fosil berupa campuran hidrokarbon yang terbentuk dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah permukaan bumi selama



ribuan hingga jutaan tahun. Komponen utama gas alam adalah metana (CH_4), namun juga mengandung senyawa hidrokarbon lainnya seperti etana, propana, dan butana serta gas non-hidrokarbon seperti nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida dalam jumlah kecil. Gas alam memiliki ciri khas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa dalam keadaan aslinya. (Lintang Rahmayanti, Dita Mey Rahmah, dan Larashati, 2021) Untuk alasan keamanan, biasanya ditambahkan zat berbau agar mudah terdeteksi jika terjadi kebocoran gas. Gas ini lebih ringan dari udara sehingga cenderung naik saat keluar ke atmosfer dan berpotensi menyebabkan ledakan serta kebakaran bila terpapar sumber api dalam konsentrasi tertentu.

Pemerintah melakukan pengalihan subsidi dari minyak tanah ke gas elpiji lalu beralih ke gas alam melalui program konversi yang dimulai pada tahun 2017 sampai sekarang. Program ini bertujuan untuk diversifikasi pasokan energi, mengurangi dampak kebakaran akibat kebocoran ketika masyarakat secara umum masih menggunakan gas LPG, tujuan program bantuan gas alam diadakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran subsidi pada lingkungan rumah tangga masyarakat. (Aris Munandar, 2025)

Program bantuan gas alam merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan sumber energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, pelaksanaan program ini kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidaktepatan sasaran penerima subsidi, penyimpangan dalam distribusi, serta tantangan perubahan kebiasaan penggunaan energi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas, efisiensi dan keadilan distribusi program bantuan gas alam ini. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan awal dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung ketahanan energi nasional di masa depan. (Riki Satia Muharam, dkk, 2025)

Sejak pemerintah menghapus subsidi minyak tanah dan menggalakkan konversi ke LPG, penggunaan gas untuk memasak meningkat pesat karena dianggap lebih praktis, efisien dan ekonomis dibandingkan bahan bakar tradisional seperti kayu atau minyak tanah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 83,36% rumah tangga di Indonesia menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Namun, penggunaan LPG juga membawa tantangan, seperti risiko kebocoran dan ledakan tabung gas yang memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keamanan. Selain itu, proses memasak dengan kompor gas menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu lingkungan sekitar, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan penggunaan gas LPG yang efisien dan aman sangat penting untuk menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan lingkungan sekitar. (Ika Kurniaty, dkk, 2020) Fenomena yang terjadi saat ini dimana pendataan penerima bantuan tidak adil, penerima bantuan ada yang tidak tepat sasaran dan sosialisasi yang kurang terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keadilan distribusi program bantuan gas alam ini. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program agar program bantuan dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hasil Kebijakan Politik Program Bantuan Gas Alam di Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran subsidi gas alam yang dirasakan oleh masyarakat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Hasil Kebijakan Politik Program Bantuan Gas Alam di Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyaluran subsidi gas alam yang dirasakan oleh masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut peneliti pentingnya menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dalam mengevaluasi kebijakan politik program bantuan gas alam adalah sebagai berikut:

- a. Teori evaluasi kebijakan publik sangat penting digunakan dalam evaluasi kebijakan politik program bantuan gas alam karena memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penerapan teori ini, dapat diketahui apakah program subsidi gas alam berjalan efektif dan tepat sasaran, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan, sehingga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan.
- b. Kebijakan publik juga memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai dasar kebijakan, sehingga tujuan kebijakan dapat lebih realistis dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain aspek teknis, teori ini juga memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program, yang sangat penting bagi kepercayaan publik. Dengan demikian, teori evaluasi kebijakan publik menjadi alat yang komprehensif untuk mengendalikan, menilai, dan mengembangkan kebijakan politik program bantuan gas alam secara berkelanjutan agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sasaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*. (Zuchri Abdussamad, 2021:53) Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai objek yang akan diteliti. (Burhan Bugin, 2019)



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kebijakan Politik Program Bantuan Gas Alam di Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang

Permasalahan evaluasi kebijakan politik mengenai bantuan gas alam belum teralisasi hingga saat ini, karena adanya kendala-kendala secara personal dari beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan alasannya. Peneliti mendapatkan informasi ini, sesuai dengan apa yang telah disepakati atas kebijakan pihak kelurahan. Seharusnya kebijakan politik atas dasar pemberian bantuan kepada masyarakat bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut jika ditinjau secara observasi apakah berhasil diselenggarakan atau sebaliknya, tujuan penelitian ini juga sebagai upaya memastikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pihak pemerintah yang terlibat ketika memang benar bantuan gas alam direalisasikan di wilayah tersebut. (Firman Noor, 2021)

Program Bantuan Gas Alam merupakan salah satu kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan energi bersih, murah, dan ramah lingkungan. Kebijakan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk distribusi tabung gas elpiji bersubsidi atau pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) yang terhubung langsung ke sumber gas alam. Secara politik, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya fluktuatif.

Observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan 35 Ilir, sangat kecil kemungkinan wilayah tersebut bisa menerima atau masuk dalam kategori penerima bantuan gas alam. Hal ini bukan tanpa alasan, dari sisi wilayah lingkungan 35 Ilir merupakan wilayah yang sangat berdekatan dengan bibir sungai musu, kemudian memiliki jangkauan penduduk yang padat. Penanaman pipa yang bisa dianggap sangat mustahil untuk dilaksanakan di wilayah tersebut. Pemerintah sangat memikirkan kepentingan dan keselamatan masyarakat, karena jangan sampai bantuan yang akan diberikan, bisa menimbulkan permasalahan yang serius bagi keselamatan masyarakat disekitarnya. (Buku Ajar Bagi Mahasiswa, 2023) Wawancara dilaksanakan dengan 4 masyarakat dan 3 pegawai di kelurahan 35 Ilir Palembang, yaitu sekretaris, pegawai dan koordinator program bantuan gas alam. Hasil penelitian tentang Evaluasi kebijakan Program Gas Alam di kelurahan 35 Ilir Palembang sebagai berikut:

1. Desain kebijakan

Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi dimana tahap penurunan harga bagi masyarakat, harus dilaporkan tetap tinggi atau bahkan dianggap langkah artinya kebijakan ini secara efektif gagal. Kemudian dilihat dari sisi kemasyarakatan program gas alam menjadi kesenjangan antara apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan (desain) dengan apa yang terjadi dilapangan (implemtasi). Ketidaktepatan sasaran dari bantuan gas alam dialokasikan, tetapi dinikmati oleh kelompok yang mampu atau industri besar yang tidak membutuhkan, sementara target sasaran sesungguhnya tidak menerimanya, maka manfaat sosial-politik menjadi nol atau bahkan dianggap negatif.

2. Implementasi politik dan anggaran

Peneliti mendapatkan informasi mengenai lingkungan padat penduduk dapat menerima bantuan gas alam dengan aman asalkan pelaksanaannya memperhatikan



standar keselamatan, prosedur instalasi yang benar, serta pengawasan yang ketat. Kota Palembang, program jaringan gas rumah tangga telah diterapkan di berbagai kelurahan, termasuk yang padat penduduk, dengan tujuan menyediakan bahan bakar yang lebih bersih, murah, dan aman dibandingkan LPG tabung.

3. Rekomendasi kebijakan

a. Reformasi total/Penghentian kebijakan:

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan program bantuan gas alam memberikan manfaat nyata, tetapi perlu perbaikan terutama dalam hal penyampaian informasi, percepatan pelaksanaan, dan peningkatan transparansi untuk memenuhi harapan masyarakat di Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang dengan lebih baik.

b. Perbaikan tata kelola: peninjauan ulang secara komprehensif

Berdasarkan keterangan tabel di atas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan pada implikasi dari survei teknis dan kondisi lokasi menunjukkan perlunya pendekatan yang disesuaikan untuk instalasi pipa berdasarkan karakteristik lingkungan dan kepadatan penduduk.

c. Peningkatan aspek keamanan dan sosialisasi

Berdasarkan hasil perolehan informasi data pada saat melakukan evaluasi kebijakan program bantuan gas alam sebelumnya di kelurahan 35 ilir kesulitan untuk direalisasikan dengan berbagai pertimbangan namun dengan adanya desain kebijakan yang akan dialihkan gas LPG 3 kg atau dialihkan ke jaringan gas (Jargas), Pemerintah daerah sudah berhasil mendistribusikan jaringan gas alam ke sebagian besar residensial di wilayah tersebut dengan tujuan meningkatkan akses energi bersih dan murah bagi masyarakat. Adanya pelaksanaan kebijakan dari legitimasi dan dukungan politik sentral, mobilisasi massa/politik anggaran, kepentingan elit lokal dan *rent seeking*, koordinasi hingga *inter-Agency Conflict* sebagai upaya program bantuan gas alam bisa direalisasikan di kelurahan 35 ilir dan diberikan dengan tujuan tepat sasaran dan mempermudah dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan ekonomi, dari implementasi anggaran berfokus pada alokasi, pencarian, dan pengawasan dana negara yang digunakan untuk membiayai program tersebut, termasuk biaya subsidi dan investasi infrastruktur.

B. Faktor kendala yang dihadapi dalam penyaluran subsidi gas alam yang dirasakan oleh masyarakat

Faktor penyebab ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi gas alam yang dirasakan oleh masyarakat di Palembang, khususnya di Kelurahan 35 Ilir, antara lain adalah kendala teknis dan operasional distribusi gas. Penyaluran gas alam sering mengalami gangguan pasokan akibat perbaikan pipa dan kendala operasional dari pihak penyedia gas, seperti yang terjadi pada beberapa kawasan yang menyebabkan penghentian sementara distribusi dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, sistem distribusi yang belum sepenuhnya terdata dengan baik menyebabkan bantuan gas alam tidak selalu sampai ke penerima yang tepat.

Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai program bantuan sosial atau kebijakan pemerintah menjadi masalah serius yang menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami hak dan mekanisme penerimaan bantuan. Informasi yang minim



membuat masyarakat tidak tahu besaran bantuan yang harus diterima, jenis bantuan, hingga prosedur pengambilan, sehingga sulit bagi mereka untuk memverifikasi apakah bantuan yang diterima sudah sesuai. Selain itu, pengumuman maupun pemberitahuan seringkali disampaikan secara mendadak dan terbatas, sehingga tidak semua orang mendapatkan informasi dengan cukup, menimbulkan kerumunan dan kebingungan. Akibatnya, sebagian masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan yang tepat, sementara sebagian lain yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. Hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program bantuan dan pemerintah, serta potensi konflik sosial. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, transparansi, dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan supaya bantuan dapat diterima secara tepat sasaran dan masyarakat memahami dengan jelas hak serta prosedurnya.

Program Bantuan Gas Alam merupakan kebijakan politik yang dirancang untuk menyediakan energi bersih, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Melalui program ini, pemerintah berupaya menggantikan penggunaan bahan bakar konvensional seperti minyak tanah dengan gas alam yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Bentuk implementasinya bisa berupa pembagian tabung LPG bersubsidi, perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas), maupun penyediaan infrastruktur pendukung diberbagai daerah. Dari perspektif politik, kebijakan ini menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan sering digunakan untuk memperkuat legitimasi serta dukungan publik terhadap yang berkuasa.

Pada dasarnya kebiasaan masyarakat untuk tetap ingin tercatat dalam data penerima bantuan merupakan cerminan dari ketergantungan terhadap jaminan sosial, rasa aman dari negara, serta keinginan untuk terus diakui sebagai bagian dari sistem kesejahteraan nasional. Namun, untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya, kebijakan bantuan perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak hanya menjadi alat pertolongan sementara, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong transformasi sosial menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. (Djoko Siswanto, 2020)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Penelitian ini penulis dapat menyajikan beberapa kesimpulan atas jawaban permasalahan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- A. Hasil evaluasi Kebijakan Politik Program Bantuan Gas Alam yaitu Program Bantuan Gas Alam (PBGA) di Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang secara umum telah memberikan manfaat dalam membantu kebutuhan energi rumah tangga dengan biaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG tabung.
- B. Terdapat kendala dalam penyaluran subsidi gas alam yang sempat dirasakan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran akibat data yang kurang akurat dan sosialisasi yang belum maksimal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan masyarakat sangat diperlukan agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Saran

Berdasarkan penjelasan hasil kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang perlu dilakukan peningkatan kualitas data penerima bantuan melalui sistem yang lebih terintegrasi dan akurat agar sasaran bantuan tepat dan mengurangi ketimpangan. Sosialisasi



program harus diperluas dengan penggunaan media yang lebih efektif dan melibatkan tokoh masyarakat serta perangkat RT untuk menjangkau seluruh lapisan warga.

DAFTAR REFERENSI

- Aris Munandar. (2025). Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg: Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs Penggunaan Industri. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4.
- Buku Ajar Bagi Mahasiswa. (2023). *Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan*.
- Burhan Bugin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djoko Siswanto. (2020). *Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.
- Firman Noor. (2021). PKB, Kegagalan Pelembagaan Shared Values dan Dampaknya. *Jurnal Penelitian Politik*, volume 12 No. 2 Desember .
- Ika Kurniaty, dkk. (2020). Potensi Pemanfaatan LPG (Liquefied Petroleum Gas) sebagai Bahan Bakar Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor . *Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek*, Vol. 1 No. 2.
- Lintang Rahmayanti, Dita Mey Rahmah, dan Larashati. (2021). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 3, No. 2, Hal. 9-16.
- Riki Satia Muharam, dkk. (2025). Kebijakan Subsidi LPG 3 KG di Jawa Barat: Distribusi Kesejahteraan, Risiko Ekologis dan Ekonomi Publik. *MANAJEMEN: JURNAL EKONOMI USI*, VOL. 7 NO 1 - EISSN: 2302 - 5964.
- Zuchri Abdussamad . (2021:53). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. syakir Media Press.